



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

LAPORAN KEUANGAN



**BAPPELITBANGDA
TAHUN ANGGARAN 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH



LAPORAN KEUANGAN

BAPPELITBANGDA

**TAHUN ANGGARAN
2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)**

Alamat : Jl. Raya by pass No. 01 Koba – Bangka Tengah 33181
Telp. (0718) 7362026

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Neraca (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan yang layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Koba, 2023
PENGUNA ANGGARAN,



Dr. H. JOKO TRIADHI, SE., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19790203 200604 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Tanggungjawab	i
Daftar Isi.....	ii
Kata Pengantar	iv
Laporan Realisasi Anggaran	
Laporan Operasional	
Laporan Perubahan Ekuitas	
Neraca	
CALK	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Bappelitbangda 2023 Kabupaten Bangka Tengah	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah	4
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Bappelitbangda Daerah Kabupaten Bangka Tengah	6
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	27
BAB III PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN BAPPELITBANGDA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH	
3.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	29
3.2 Laporan Operasional	34
3.3 Neraca	38
3.4 Laporan Perubahan Ekuitas	43

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI
NON KEUANGAN BAPPELITBANGDA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH

4.1	Kedudukan / Dasar Hukum / Dasar Kebijakan	45
4.2	Tugas Pokok dan Fungsi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	48
4.3	Struktur Organisasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah	50
4.4	Data Pegawai	51
4.5	Kebijakan	53
4.6	Program	54

BAB V PENUTUP

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat-Nya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah dapat disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Kas Menuju Akrual ini dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Setiap Entitas Pelaporan wajib melaksanakan SAP berbasis Akrual, Bappelitbangda Daerah Kabupaten Bangka Tengah adalah salah satu Entitas Akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah mengacu pada Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1073). Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah ini dapat sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024.

Koba, 2023
PENGUNA ANGGARAN,



Dr. H. Joke Triadhi, SE.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19790203 200604 1 003

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023 DAN 2022

LAPORAN REALISASI ANGGARAN [SAP] DESEMBER

NO	U R A I A N	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 sd. 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (10 sd. 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (16 sd. 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Transfer Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (21 + 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 19 + 23)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (26 sd. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 24 + 29)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	BELANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Belanja Pegawai	4.581.846.000,00	4.139.879.741,00	90,35	0,00
34	Belanja Barang	2.677.475.000,00	2.431.555.282,00	90,82	0,00
35	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Jumlah Belanja Operasi (33 sd. 38)	7.259.321.000,00	6.571.435.023,00	90,52	0,00
40	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Belanja Peralatan dan Mesin	263.150.000,00	254.950.000,00	96,88	0,00
43	Belanja Gedung dan Bangunan	1.741.000.000,00	1.682.528.033,00	96,64	0,00
44	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.000.000,00	4.400.000,00	88,00	0,00
45	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	U R A I A N	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
46	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Jumlah Belanja Modal (41 sd. 46)	2.009.150.000,00	1.941.878.033,00	96,65	0,00
48	BELANJA TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Jumlah Belanja Tak Terduga (49)	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Jumlah Belanja (39 + 47 + 50)	9.268.471.000,00	8.513.313.056,00	91,85	0,00
52	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
53	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Jumlah Transfer (54 sd. 57)	0,00	0,00	0,00	0,00
59	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 58)	9.268.471.000,00	8.513.313.056,00	91,85	0,00
60	Surplus / (Defisit) (30 - 60)	-9.268.471.000,00	-8.513.313.056,00	91,85	0,00
61	PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
62	PENERIMAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Jumlah Penerimaan Daerah (63 sd. 68)	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PENGELUARAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Jumlah Pengeluaran Daerah (71 sd. 74)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	PEMBIAYAAN NETTO (69 - 75)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (60	-9.268.471.000,00	-8.513.313.056,00	91,85	0,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN 2022
LAPORAN OPERASIONAL DESEMBER

NO	U R A I A N	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BEBAN	6.956.429.606,3	0,00	6.956.429.606,3	
25	BEBAN OPERASI	6.956.429.606,3	0,00	6.956.429.606,3	
26	Beban Pegawai	4.135.049.741,0	0,00	4.135.049.741,0	
27	Beban Persediaan	548.428.400,00	0,00	548.428.400,00	
28	Beban Barang dan Jasa	826.368.554,00	0,00	826.368.554,00	
29	Beban Pemeliharaan	189.523.643,00	0,00	189.523.643,00	
30	Beban Perjalanan Dinas	970.705.635,00	0,00	970.705.635,00	
31	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Beban Penyusutan dan Amortisasi	286.353.633,31	0,00	286.353.633,31	
36	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
39	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	-	0,00	-	-
40	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
41	SURPLUS NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Nonlancar	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
45	DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	U R A I A N	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
46	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Nonlancar	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
49	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-	0,00	-	-
50	POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
53	SURPLUS/DEFISIT - LO	-	0,00	-	-

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN 2022
Laporan Perubahan Ekuitas

NO	U R A I A N	2023	2022
1	Ekuitas Awal	1,717,703,860.29	0.00
2	Surplus/(Defisit) - LO	-7,128,023,006.31	0.00
3	Jumlah Ekuitas Akhir sebelum Dampak Kumulatif: (1 + 2)	-5,410,319,146.02	0.00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	0.00	0.00
5	Koreksi Nilai Piutang	0.00	0.00
6	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0.00	0.00
7	Koreksi Nilai Persediaan	0.00	0.00
8	Koreksi Nilai Aset Tetap	0.00	0.00
9	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0.00	0.00
10	Koreksi Nilai Aset Lainnya	0.00	0.00
11	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0.00	0.00
12	Koreksi Nilai Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0.00	0.00
13	Koreksi Laba (Rugi) Penyertaan Modal	0.00	0.00
14	Penyesuaian Nilai Pengakuan Aset Tetap	0.00	0.00
15	Penyesuaian Nilai Aset Ekstrakomptabel	0.00	0.00
16	Penyesuaian Piutang Transfer Pusat	0.00	0.00
17	Penyesuaian Utang Transfer Pusat	0.00	0.00
18	Koreksi Nilai Utang PDAM	0.00	0.00
19	Koreksi Utang Jasa Pelayanan Kesehatan	0.00	0.00
20	Koreksi Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0.00	0.00
21	Koreksi Utang Belanja Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	0.00	0.00
22	Koreksi Saldo Dana Desa	0.00	0.00
23	Penyesuaian Dana Bantuan Pemerintah	0.00	0.00
24	Mutasi Serah Terima antar SKPD	409,698,360.90	0.00
25	Penyesuaian Saldo Kas di Kas Daerah	8,506,309,931.00	0.00
26	Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar (5 sd. 25)	8,916,008,291.90	0.00
27	Jumlah Ekuitas Akhir: (3 + 26)	3,505,689,145.88	0.00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN 2022
NERACA

NO	U R A I A N	2023	2022
1	ASET	3.505.689.145,88	0,00
2	ASET LANCAR	11.413.925,00	0,00
3	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
4	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
7	Kas di BLUD	0,00	0,00
8	Kas Dana BOS	0,00	0,00
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
10	Kas Lainnya	0,00	0,00
11	Setara Kas	0,00	0,00
12	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
13	Piutang Pajak	0,00	0,00
14	Piutang Retribusi	0,00	0,00
15	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
17	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
18	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
19	Piutang Lainnya	0,00	0,00
20	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
21	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
22	Persediaan	11.413.925,00	0,00
23	INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
24	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
25	Investasi kepada BUMN	0,00	0,00
26	Investasi kepada BUMD	0,00	0,00
27	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
28	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
29	Dana Bergulir	0,00	0,00
30	Investasi Permanen	0,00	0,00
31	Penyertaan Modal	0,00	0,00
32	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
33	ASET TETAP	3.492.343.970,88	0,00
34	Tanah	52.500.000,00	0,00
35	Peralatan dan Mesin	3.774.796.323,98	0,00
36	Gedung dan Bangunan	3.188.543.486,00	0,00
37	Jalan, Irigasi dan Jaringan	184.604.634,00	0,00
38	Aset Tetap Lainnya	142.846.000,00	0,00
39	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
40	Akumulasi Penyusutan	-3.850.946.473,10	0,00
41	Aset Tetap Konsesi Jasa	0,00	0,00
42	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Konsesi Jasa	0,00	0,00
43	DANA CADANGAN	0,00	0,00
44	Dana Cadangan	0,00	0,00
45	PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00

NO	U R A I A N	2023	2022
46	Properti Investasi	0,00	0,00
47	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00
48	ASET LAINNYA	1.931.250,00	0,00
49	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
50	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
51	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
53	Aset Tak Berwujud	192.995.000,00	0,00
54	Aset Lain-lain	0,00	0,00
55	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-191.063.750,00	0,00
56	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
57	KEWAJIBAN	0,00	0,00
58	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
59	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
60	Utang Bunga	0,00	0,00
61	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
62	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
63	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
64	Utang Belanja	0,00	0,00
65	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
66	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
67	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
68	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
69	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
70	Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00
71	Premium (Diskonto) Obligasi	0,00	0,00
72	EKUITAS	3.505.689.145,88	0,00
73	EKUITAS	10.633.712.152,19	0,00
74	Surplus/Defisit-LO	-7.128.023.006,31	0,00
75	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.505.689.145,88	0,00

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun 2023 BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan dalam membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran OPD.
- b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya.
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2023 BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70);
- k. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269); Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 nomor 284) Nomor register Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (4.4/2020) tanggal 14 September 2020;
- l. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 291);
- m. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah 2023 Nomor 217);
- n. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1);
- o. Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1131);

- p. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2032 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1316)

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan akhir Tahun 2023 BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah.
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan akhir Tahun 2023 BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah.
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan akhir Tahun 2023 BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN AKHIR BAPPELLITBANGDA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Bappelitbangda Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kebijakan Keuangan BAPPELITABANGDA Kabupaten Bangka Tengah
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN AKHIR BAPPELITBANGDA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

- 3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos – pos pelaporan keuangan akhir BAPPELITBANGDA Daerah Kabupaten Bangka Tengah
- 3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Bappelitbangda Daerah Kabupaten Bangka Tengah

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN BAPPELITBANGDA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

BAB V PENUTUP

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Semester BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah.

Realisasi pencapaian target kinerja APBD di lingkup BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah, dilihat dari realisasi efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp 9.268.471.000,00 terealisasi Rp 7.074.902.494,00 atau 91,78% dengan sisa anggaran Rp 762.161.069,00

Secara terinci realisasi pencapaian target kinerja keuangan dapat disajikan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Tabel II.1.

No	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	7.634.835.000,00	7.074.902.494,00	92,67	559.932.506,00
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.089.000,00	12.839.000,00	85,09	2.250.000,00
	a. Penyuaunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.089.000,00	12.839.000,00	85,09	2.250.000,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.601.846.000,00	4.158.783.792,00	90,38	443.062.208,00
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.581.846.000,00	4.139.879.741,00	90,35	441.966.259,00
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	20.000.000,00	18.904.051,00	94,52	1.095.949,00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.500.000,00	11.768.424,00	67,25	5.731.576,00
	a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik	10.000.000,00	7.043.624,00	70,44	2.956.376,00

No	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
	Daerah pada SKPD				
	b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.500.000,00	4.724.800,00	63	2.775.200,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	17.911.898,00	89,56	2.088.102,00
	a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang	20.000.000,00	17.911.898,00	89,56	2.088.102,00
5.	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	250.540.000,00	238.511.525,00	95,20	12.028.475,00
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	3.899.000,00	97,48	101.000,00
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00	43.090.500,00	95,76	1.909.500,00
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.000.000,00	17.723.800,00	84,40	3.276.200,00
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,340,000.00	27,850,450.00	94.92	1,489,550.00
	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1,200,000.00	1,200,000.00	100	-
	f. Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150,000,000.00	144,747,775.00	96.50	5,252,225.00
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	263,150,000.00	254,950,000.00	96.88	8,200,000.00
	a. Pengadaan Mebel	34,000,000.00	32,200,000.00	94.71	1,800,000.00

No	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	229,150,000.00	222,750,000.00	97.21	6,400,000.00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	488,410,000.00	469,612,070.00	96.15	18,797,930.00
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	129,610,000.00	122,160,740.00	94.25	7,449,260.00
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97,800,000.00	89,990,422.00	92.01	7,809,578.00
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	261,000,000.00	257,460,908.00	98.64	3,539,092.00
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,978,300,000.00	1,910,525,785.00	96.57	67,774,215.00
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67,410,000.00	65,848,136.00	97.68	1,561,864.00
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108,990,000.00	103,333,384.00	94.81	5,656,616.00
	c. Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,755,700,000.00	1,696,638,158.00	94.81	59,061,842.00
	d. Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46,200,000.00	44,706,107.00	96.64	1,493,893.00

1. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Dengan anggaran Rp 15.089.000,00 terealisasi sebesar Rp 12.839.000,00 atau 85,09% dengan rincian:

- Belanja alat/bahan kegiatan kantor-alat tulis kantor Rp 679.000,00
- Belanja alat/bahan kegiatan kantor-bahan cetak Rp 455.000,00
- Belanja makanan dan minum rapat Rp 4.200.000,00
- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia Rp 1.350.000,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 4.275.000,00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 1.880.000,00

2. **Penyediaan gaji dan tunjangan ASN**

Penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp 4.581.846.000,00 dan realisasi sebesar Rp 4.139.879.741,00 atau 90,35 % dengan rincian:

- Belanja gaji pokok PNS Rp 1.764.117.700,00
- Belanja tunjangan keluarga PNS Rp 138.359.854,00
- Belanja tunjangan jabatan PNS Rp 123.770.000,00
- Belanja tunjangan fungsional PNS Rp 87.460.000,00
- Belanja tunjangan fungsional umum PNS Rp 53.490.000,00
- Belanja tunjangan beras Rp 98.708.560,00
- Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Rp 4.802.983,00
- Belanja pembuatan gaji Rp 30.062,00
- Belanja iuran asuransi Kesehatan Rp 131.240.877,00
- Belanja iuran asuransi jaminan kecelakaan kerja Rp 3.609.893,00
- Belanja iuran asuransi jaminan kematian Rp 10.829.557,00
- Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS Rp 0,00
- Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Rp 1.620.680.355,00
- Belanja honorarium pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah Rp 90.780.000,00
- Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan Rp 12.000.000,00

3. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun**
Penyerapan sub kegiatan ini sebesar Rp 18.904.051,00 dengan rincian:
 - Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 18.174.051,00
 - Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 730.000,00
4. **Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD**
Penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 7.043.624,00 atau 70 % dengan rincian :
 - Belanja Perjalanan Dinas biasa sebesar Rp 7.043.624,00
5. **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**
Terealisasi Rp. 4.724.800,00 dengan rincian
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp.450.000,00
 - Belanja perjalanan dinas biasa Rp. 1.840.000,00
 - Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp. 2.434.800,00
6. **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan**
Terealisasi belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 17.911.898,00
7. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor**
Penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor terealisasi sebesar Rp 3.899.000,00 untuk Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik.
8. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
Penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi sebesar Rp 43.090.500,00 untuk Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor.
9. **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**
Penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor terealisasi sebesar Rp. 17.723.800,00 dengan rincian:
 - Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 4.845.000,00
 - Belanja makanan dan minuman jamuan tamu Rp. 12.878.800,00

10. **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Penyerapan anggaran pada Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 27.850.450,00 dengan rincian :

- Belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor Rp.10.481.450,00
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Rp 17.369.000,00

11. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan terealisasi sebesar Rp 1.200.000,00 untuk belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah.

12. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terealisasi sebesar Rp 144.747.775,00 dengan rincian :

- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 126.275.775,00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 18.472.000,00

13. **Pengadaan Mebel**

Penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel terealisasi sebesar Rp 32.200.000,00 dengan rincian :

- Belanja Modal Mebel Rp 24.200.000,00
- Belanja Modal alat penyimpan perlengkapan kantor Rp.8.000.000,00

14. **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Kegiatan ini terealisasi Rp. 222.750.000,00 dengan rincian:

- Belanja modal alat kantor lainnya Rp 8.700.000,00
- Belanja modal alat pendingin Rp 21.400.000,00
- Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) Rp 8.150.000,00
- Belanja modal peralatan studio video dan film Rp 23.000.000,00
- Belanja modal personal computer Rp 145.700.000,00
- Belanja modal peralatan personal computer Rp 15.800.000,00

15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi sebesar Rp 122.160.740,00 atau 94 % dengan rincian:

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos (materai) Rp 1.040.000,00
- Belanja jasa tenaga administrasi Rp 112.285.000,00
- Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN Rp 8.256.401,00
- Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non PNS Rp 257.484,00
- Belanja iuran jaminan kematian bagi non PNS Rp 321.855,00

16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp 89.990.422,00 atau 92% dengan rincian :

- Belanja tagihan telepon Rp 2.282.422,00
- Belanja tagihan listrik Rp 2.258.000,00
- Belanja tagihan listrik Rp 81.050.000,00
- Belanja modal jaringan distribusi Rp 4.400.000,00

17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 257.460.908,00 atau 98 % dengan rincian:

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor Rp 4.969.500,00
- Belanja jasa tenaga administrasi Rp 210.420.000,00
- Belanja jasa tenaga keamanan Rp 25.180.000,00
- Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN Rp 15.673.168,00
- Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Rp 541.440,00
- Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN Rp 676.800,00

18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyerapan anggran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi sebesar Rp 65.848.136,00 atau 97% dengan rincian :

- Belanja jasa tenaga supir Rp 25.180.000,00
- Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan Rp 1.212.300,00
- Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN Rp 1.119.512,00
- Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Rp 58.032,00
- Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN Rp 72.540,00
- Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang Rp 38.205.752,00

19. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi sebesar Rp 69.701.564,00 atau 92,12 % dengan rincian :

- Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan Rp 3.828.600,00
- Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang Rp 103.333.384,00

20. **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terealisasi sebesar Rp 1.696.638.158,00 atau 96% dengan rincian :

- Belanja pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor Rp 14.110.125,00
- Belanja modal bangunan gedung kantor Rp 1.582.528.033,00

21. **Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terealisasi sebesar Rp 44.706.107,00 atau 96% dengan rincian:

- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya Rp 600.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga – Alat Rumah Tangga- Alat Pembersih Rp 2.460.107,00
- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga -alat rumah

tangga - alat pendingin Rp 17.080.000,00

- Belanja pemeliharaan Komputer – Komputer unit personal computer
Rp 24.566.000,00

Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tabel II.2.

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
II	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	567.255.000,00	501.947.946,00	88,49	43.758.956,00
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	449.295.000,00	405.006.493,00	90,14	44.288.507,00
	a. Pelaksanaan Konsultasi Publik	22.980.000,00	21.795.000,00	94,84	1.185.000,00
	b. Koordinasi pelaksanaan forum SKPD/ Lintas SKPD	16.395.000,00	15.400.000,00	93,93	994.900,00
	c. Pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota	59.920.000,00	54.087.630,00	90,27	5.832.370,00
	d. Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	350.000.000,00	313.723.763	89,64	36.276.237,00
2.	Analisi Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan SKPD	32.960.000,00	26.062.106,00	79,07	6.897.894,00
	a. Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	32.960.000,00	26.062.106,00	79,07	6.897.894,00
3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	85.000.000,00	70.879.365,00	83.39	

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
	a. Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/ kota	35.000.000,00	24.299.608,00	69,43	10.700.392,00
	b. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	50.000.000,00	46.579.757,00	93,16	3.420.243,00

22. Pelaksanaan Konsultasi Publik

Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 21.795.000,00 atau 94% dengan rincian:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp 3.080.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Rp 890.000,00
- Belanja makanan dan minuman rapat Rp 8.400.000,00
- Honorarium narasumber, pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia Rp 5.800.000,00
- Belanja sewa bangunan Gedung tempat pertemuan Rp 350.000,00
- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 3.275.000,00

23. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD

Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 15.400.100,00 atau 93% dengan rincian :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp 1.892.100,00
- Belanja alat/bahan kegiatan kantor-bahan cetak Rp 288.000,00
- Belanja makan minum rapat Rp 12.320.000,00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 900.000,00

24. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini terealisasi Rp 54.087.630,00 atau 90 dengan rincian:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp 1.995.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Rp 3.450.000,00
- Belanja makan minum rapat Rp 9.410.000,00
- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panita Rp 7.825.000,00
- Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan Rp 700.000,00
- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 20.207.630,00
- Belanja perjalanan dalam kota Rp 100.500.000,00

25. **Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabuapten/Kota**

Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 313.723.763,00 atau 89 dengan rincian:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp 9.328.200,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Rp 23.940.000,00
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya Rp 7.275.000,00
- Belanja makan minum rapat Rp 35.241.000,00
- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia Rp 25.825.000,00
- Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan Rp 64.920.000,00
- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 98.725.863,00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 10.968.700,00
- Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota Rp 37.500.000,00

26. **Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD**

Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 26.062.106,00 atau 79 dengan rincian:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp 2.782.500,00

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Rp 105.000,00
- Belanja makan minum rapat Rp 5.872.000,00
- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia Rp 1.590.000,00
- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 14.687.606,00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 665.000,00

27. **Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 24.299.608,00 atau 69 dengan rincian:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp 2.240.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Rp 940.000,00
- Belanja makan minum rapat Rp 3.000.000,00
- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia Rp 1.950.000,00
- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 15.114.608,00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 1.055.000,00

28. **Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah**

Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 46.579.757,00 atau 93 dengan rincian:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp 3.393.250,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Rp 940.000,00
- Belanja makan minum rapat Rp 7.895.000,00
- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia Rp 600.000,00
- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 25.201.507,00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 8.550.000,00

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel II.3.

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	737.205.000,00	652.754.010,00	88,54	84.450.990,00
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	280.000.000,00	273.655.922,00	97,73	6.344.078,00
	a. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	85.000.000,00	82.818.334,00	97,43	2.181.666,00
	b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	30.000.000,00	29.868.800,00	99,56	131.200,00
	c. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	135.000.000,00	131.581.988,00	97,47	3.418.012,00
	d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	30.000.000,00	29.386.800,00	97,96	613.200,00
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	232.205.000,00	203.958.685,00	87,84	28.246.315,00
	a. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	89.545.000,00	76.022.740,00	84,90	13.522.260,00
	b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	26.960.000,00	22.582.000,00	83,76	4.378.000,00

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
	c. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	90.700.000,00	82.834.945,00	91,33	7.865.055,00
	d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	25.000.000,00	22.519.000,00	90,08	2.481.000,00
3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	225.000.000,00	175.139.403,00	77,84	49.860.597,00
	a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	95.000.000,00	75.953.818,00	79,95	19.046.182,00
	b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	25.000.000,00	15.094.000,00	60,38	9.906.000,00
	c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.000.000,00	66.251.585,00	82,81	13.748.415
	d. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	25.000.000,00	17.840.000,00	71,36	7.160.000,00

29. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 82.818.334,00 atau 97% dengan rincian:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp 1.679.900,00

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Rp 1.510.000,00
- Belanja makan minum rapat Rp 19.118.500,00
- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia Rp 14.850.000,00
- Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan Rp 3.650.000,00
- Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan Rp 1.000.000,00
- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 33.144.934,00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp. 7.865.000,00

30. **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah**

Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 29.868.800,00 atau 99% dengan rincian:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp 1.190.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Rp 460.000,00
- Belanja makan minum rapat Rp 6.553.800,00
- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan paniti Rp 5.325.000,00
- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 4.490.000,00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp. 11.850.000,00

31. **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)**

Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 131.581.988,00 atau 97% dengan rincian:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp 1.749.550,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Rp 3.044.000,00
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos Rp 260.000,00
- Belanja makan minum rapat Rp 24.750.700,00
- Belanja pakaian dinas lapangan (PDL) Rp 3.500.000,00

- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia Rp 21.375.000,00
- Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan Rp 3.650.000,00
- Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang Rp 1.000.000,00
- Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan Rp 500.000,00
- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 59.757.738,00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 11.995.000,00

32. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 29.386.800,00 atau 97% dengan rincian:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp 1.189.800,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Rp 600.000,00
- Belanja makan minum rapat Rp 7.937.000,00
- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia Rp 4.950.000,00
- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 5.260.000,00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 9.450.000,00

33. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 76.022.740,00 atau 84% dengan rincian:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp 2.695.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Rp 294.000,00
- Belanja makan minum rapat Rp 14.760.000,00
- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia Rp 7.350.000,00
- Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana

kegiatan Rp 11.500.000,00

- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 34.323.740,00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 5.100.000,00

34. **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian**

Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 22.582.000,00 atau 83% dengan rincian:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp 770.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Rp 147.000,00
- Belanja makan minum rapat Rp 2.100.000,00
- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 9.190.000,00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 10.375.000,00

35. **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 82.834.945,00 atau 91% dengan rincian:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp 3.080.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Rp 616.000,00
- Belanja makan minum rapat Rp 14.394.000,00
- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia Rp 6.825.000,00
- Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan Rp 15.400.000,00
- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 37.184.945,00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 5.335.000,00

36. **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA**

Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 22.519.000,00 atau 90% dengan rincian:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp 1.050.000,00
- Belanja makan minum rapat Rp 5.434.000,00
- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 6.655.000,00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 9.380.000,00

37. **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)**

Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 75.953.818,00 atau 79% dengan rincian:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp 1.680.000,00
- Belanja makan minum rapat Rp 6.779.000,00
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Rp 6.600.000,00
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp 27.700.000,00
- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 29.349.818,00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 3.845.000,00

38. **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur**

Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 11.587.000,00 atau 46.35% dengan rincian:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp 1.820.000,00
- Belanja makan minum rapat Rp 1.854.000,00
- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 3.430.000,00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 7.990.000,00

39. **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)**

Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 66.251.585,00 atau 82% dengan rincian:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp 1.750.000,00

- Belanja makan minum rapat Rp 13.072.000,00
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Rp 6.150.000,00
- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 35.894.585,00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 9.385.000,00

40. **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan**

Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 17.840.000,00 atau 71% dengan rincian:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp 1.960.000,00
- Belanja makan minum rapat Rp 5.840.000,00
- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 2.050.000,00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 7.990.000,00

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tabel II.4.

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
IV	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	329.176.000,00	276.705.463,00	84,06	52.470.537,00
1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	167.880.000,00	144.048.889,00	81,40	9.091.685,00
	a. Penelitian dan Pengembangan bidang aspek-aspek sosial	48,880,000.00	39,788,315.00	81.40	9,091,685.00
	b. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	49,000,000.00	34,470,514.00	70.35	14,529,486.00
	c. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	70,000,000.00	69,790,060.00	99.70	209,940.00
3.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	161.296.000,00	132.790.060,00	82,24	28.639.426,00
	a. Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	83.146.000,00	74.027.542,00	89,03	9.118.458,00

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
	b. Diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	62.900.000,00	46.379.032,00	73,73	16.520.968,00
	c. Fasilitasi hak kekayaan intelektual	15.250.000,00	12.240.000,00	80,33	3.000.000,00

41. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial

Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 39.788.315,00 atau 81% dengan rincian:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp 1.050.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Rp 805.000,00
- Belanja makan minum rapat Rp 5.852.000,00
- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 19.631.315,00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 12.450.000,00

42. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 34.470.514,00 atau 70% dengan rincian:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp 630.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Rp 460.000,00
- Belanja makan minum rapat Rp 4.394.000,00
- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 24.761.514,00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 4.225.000,00

43. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 69.790.060,00 atau 99% dengan rincian:

- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Rp 60.000.000,00
- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 9.790.060,00

44. **Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi**

Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 74.027.542,00 atau 89% dengan rincian:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp 560.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Rp 230.000,00
- Belanja makan minum rapat Rp 2.784.400,00
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Rp 8.100.000,00
- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 50.408.142,00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 11.945.000,00

45. **Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Bersifat Inovatif**

Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 46.379.032,00 atau 73% dengan rincian:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp 656.250,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Rp 345.000,00
- Belanja makan minum rapat Rp 10.512.000,00
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Rp 2.550.000,00
- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 26.815.782,00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 3.000.000,00
- Belanja hadiah yang bersifat perlombaan Rp 2.500.000,00

46. **Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual**

Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 12.250.000,00 atau 80% dengan rincian:

- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp 12.250.000,00

2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Sejumlah langkah pembenahan telah dilakukan oleh Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah dan beberapa hasil signifikan juga telah diperoleh. Namun, mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam manajemen pemerintahan maupun perencanaan, ternyata masih terdapat permasalahan dalam akuntabilitas dan perencanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, antara lain:

1. Masih lemahnya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good public governance*);
2. Kurang konsisten dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan permasalahan tersebut antara lain disebabkan:
 1. Pelaksanaan program dan kegiatan masih tidak sesuai KAK
 2. Keterbatasan serta belum optimalnya kinerja SDM aparatur karena belum meratanya kompetensi aparatur;
 3. Belum memadainya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kelemahan tersebut akan menjadi perhatian dan fokus prioritas Bappelitbangda Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk dibenahi/diatasi dalam tahun ke depan.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SEMESTER BAPPELITBANGDA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Selama periode tahun anggaran 2023 **BAPPELITBANGDA** Kabupaten Bangka Tengah menerima anggaran **Rp 9.268.471.000,00** (*Sembilan milyar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) digunakan untuk membiayai belanja operasional 40 (empat puluh) sub kegiatan. Dari anggaran tersebut selama tahun 2022 terealisasi sebesar **Rp 8.506.309.931,00** (*delapan milyar lima ratus enam juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*) atau sebesar 91,78% dari total anggaran.

Posisi keuangan (neraca) BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah 2023 jumlah aset adalah sebesar **Rp 3.505.689.145,88** (*tiga milyar lima ratus lima juta enam ratus delapan puluh Sembilan seratus empat puluh lima koma delapan puluh delapan rupiah*), kewajiban Rp.0,00 (*nol rupiah*) dan ekuitas adalah sebesar **Rp 3.505.689.145,88** (*tiga milyar lima ratus lima juta enam ratus delapan puluh Sembilan seratus empat puluh lima koma delapan puluh delapan rupiah*).

Untuk semakin memberikan informasi mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 maka dipandang perlu untuk memberikan rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Kabupaten Bangka Tengah, adapun rincian tersebut adalah sebagai berikut:

3.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

3.1.1 Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah sebagai entitas akuntansi tidak mempunyai Pendapatan LRA atau Pendapatan LRA sebesar Rp0,00.

3.1.2 Belanja

Total Realisasi belanja BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 sebesar **Rp 8.506.309.931,00** dari anggaran sebesar **Rp 9.268.471.000,00** atau 91,85% .

1. Belanja Operasi

Total realisasi sebesar Rp 6.564.431.898,00 dengan anggaran sebesar Rp 7.259.321.000,00 atau 90,52% yang meliputi :

a. Belanja Pegawai

Total Realisasi belanja Pegawai BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 sebesar **Rp 4.139.879.741,00** dengan anggaran sebesar **Rp 4.581.846.000,00** atau 90,35% .

• Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Terealisasi sebesar Rp 2.416.419.386,00 atau 85% terdiri dari:

- Gaji Pokok PNS dengan realisasi sebesar Rp.1.764.117.700,00 atau sebesar 90,45%.
- Tunjangan keluarga sebesar terealisasi sebesar Rp.138.359.854,00 atau 81,76%.
- Tunjangan Jabatan terealisasi sebesar Rp.123.770.000,00 atau 99,57%.

- Tunjangan Fungsional terealisasi sebesar Rp 87.460.000,00 atau 74,56%.
- Tunjangan Fungsional Umum terealisasi sebesar Rp 53.490.000,00 atau 94,11%.
- Tunjangan Beras terealisasi sebesar Rp 98.708.460,00 atau 89,73%.
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus terealisasi sebesar Rp 4.802.983,00 atau 96,06%.
- Pembulatan Gaji terealisasi sebesar Rp 30.062,00 atau 9,66%.
- Iuran Jaminan Kesehatan terealisasi sebesar Rp 131.240.877,00 atau 86,83%
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) terealisasi sebesar Rp 3.609.893,00 atau 83,40%
- Iuran Asuransi Jaminan Kematian (JKM) terealisasi sebesar Rp 10.829.557,00 atau 83,40%

• **Belanja Tambahan Penghasilan ASN**

Total anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS sebesar Rp 1.735.091.800,00 terealisasi sebesar Rp 1.620.680.355,00 atau 93,41%.

• **Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

Total anggaran Rp.135.880.400,00 dengan realisasi sebesar Rp.102.780.000,00 atau 76% terdiri dari:

- Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan Rp.90.780.000,00 atau 75,25%
- Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan sebesar Rp.12.000.000,00 atau 78,69%

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa tahun 2023 terealisasi sebesar Rp.2.424.552.157,00 terdiri dari :

• Belanja Barang

Belanja barang dengan dengan realisasi sebesar Rp 430.951.200,00 terdiri dari:

- Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi Rp.7.003.125,00
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor terealisasi Rp.102.472.500,00
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak Rp 57.338.000,00
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- benda pos Rp 1.300.000,00 atau
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- perabot kantor Rp 4.969.500,00
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat listrik Rp 3.899.000,00
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya Rp 7.275.000,00
- Belanja makanan dan minuman rapat Rp 237.318.400,00
- Belanja makanan dan minuman jamuan tamu Rp 12.878.800,00
- Belanja pakaian dinas lapangan (PDL) Rp 3.500.000,00

• Belanja Jasa

Dengan dengan realisasi sebesar Rp.823.868.554,00

- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sebesar Rp 129.375.000,00

- Belanja tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan Rp 126.820.000,00
- Belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp 322.705.000,00
- Belanja jasa tenaga keamanan sebesar Rp.25.180.000,00 atau 100%
- Belanja jasa tenaga supir Rp 25.180.000,00
- Belanja tagihan telpon Rp 2.282.422,00
- Belanja tagihan air Rp 2.258.000,00
- Belanja tagihan listrik Rp 81.050.000,00
- Belanja langganan jurnal/ surat kabar/ majalah Rp 1.200.000,00
- Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan Rp 17.290.900,00
- Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN Rp 25.049.081,00 atau 91%
- Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Rp 856.956,00
- Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN Rp 1.071.195,00 atau
- Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang Rp 1.000.000,00
- Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan – jasa studi penelitian dan bantuan teknik Rp 60.000.000,00

• **Belanja Pemeliharaan**

Dengan realisasi Rp 196.526.768,00 yang terdiri dari :

- Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang Rp 137.710.536,00
- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya Rp 600.000,00

- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga – alat rumah tangga- alat pembersih Rp 2.460.107,00 atau 43%
- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat rumah tangga- alat pendingin Rp 17.080.000,00
- Belanja pemeliharaan computer- computer unit- personal computer Rp 24.566.000,00
- Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor Rp 14.110.000,00

• **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja ini dengan realisasi Rp 970.705.635,00 yang terdiri dari :

- Belanja perjalanan dinas biasa Rp 744.870.135,00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 188.335.500,00
- Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota Rp 37.500.000,00

• **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Belanja ini dengan realisasi sebesar Rp. 2.500.000,00 digunakan sebagai hadiah yang bersifat perlombaan.

3.1.3 Surplus / Defisit

Total Realisasi Surplus / Defisit BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp.-8.513.313.056,00 dengan Anggaran Rp.-9.266.471.000,00,- atau 91,85%, defisit terjadi dikarenakan Bappelitbangda tidak ada pendapatan.

3.2. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

3.2.1 Pendapatan

Bappelitbangda merupakan Badan yang tidak mengelola pendapatan atau menerima retribusi, sehingga pos pendapatan di LO Nihil

3.2.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban yang tercatat pada Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 sebesar Rp. 7.121.019.881,31 terdiri dari beban operasi dan beban penyusutan-amortisasi.

Beban Operasi

1. Beban Pegawai

Beban pegawai dengan realisasi Rp 4.135.049.741,00 beban ini terdiri dari :

- a. Beban gaji dan tunjangan ASN Rp.2.416.419.386,- terdiri dari
 - Beban gaji pokok PNS Rp 1.764.117.700,00
 - Beban tunjangan keluarga PNS Rp 138.359.854,00
 - Beban tunjangan jabatan PNS Rp 123.770.000,00
 - Beban tunjangan fungsional PNS Rp 87.460.000,00
 - Beban tunjangan fungsional umum PNS Rp 53.490.000,00
 - Beban tunjangan beras PNS Rp 98.708.460,00
 - Beban tunjangan PPH/ tunjangan khusus PNS Rp 4.802.983,00,00
 - Beban tunjangan pembulatan gaji PNS Rp 30.062,00

- Beban iuran jaminan Kesehatan PNS Rp 131.240.877,00
 - Beban iuran jaminan kecelakaan kerja PNS Rp 3.609.893,00
 - Beban iuran jaminan Kematian PNS Rp 10.829.557,00
- b. Beban tambahan penghasilan PNS
- Beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN selama tahun 2023 Rp 1.620.680.355,00
- c. Beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN Rp.97950.000,00
- Beban honorarium penanggungjawab pengelola keuangan Rp 85.950.000,00
 - beban jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan Rp 12.000.000,00
2. Beban Barang dan Jasa Rp.2.528.023.107 terdiri dari:
- a. Beban barang tahun 2022 sebesar Rp.548.428.400,00
- Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor Rp 205.985.700,00
 - Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover Rp 4.499.000,00
 - Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak Rp 57.338.000,00
 - Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor- benda pos Rp 1.300.000,00
 - Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan computer Rp 5.630.000,00
 - Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor- perabot kantor Rp 8.890.500,00
 - Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat listrik Rp 3.813.000,00
 - Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya Rp 7.275.000,00

- Beban makanan dan minuman rapat Rp 237.318.400,00
 - Beban makanan dan minuman jamuan tamu Rp 12.878.800,00
 - Beban pakaian dinas lapangan Rp 3.500.000,00
- b. Beban Jasa terealisasi tahun 2022 sebesar Rp 823.868.554,00
- Beban honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia Rp 129.375.000,00
 - Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp 126.820.000,00
 - Beban jasa tenaga administrasi Rp 322.705.000,00
 - Beban jasa tenaga keamanan Rp 25.180.000,00
 - Beban jasa tenaga supir Rp 25.180.000,00
 - Beban tagihan telepon Rp 2.282.422,00
 - Beban tagihan listrik Rp. 81.050.000,00
 - Beban langganan jurnal/surat kabar/majalah Rp 1.200.000,00
 - Beban pembayaran pajak, bea dan perizinan Rp 17.290.900,00
 - Beban iuran jaminan Kesehatan bagi non ASN Rp 25.049.081,00
 - Beban iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN Rp 856.956,00
 - Beban iuran jaminan kematian kerja bagi non ASN Rp 1.071.195,00
 - Beban sewa kendaraan bermotor penumpang Rp 1.000.000,00
 - Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Rp 60.000.000,00
- c. Beban Pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp.182.520.518,00
- Beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat

bermotor-kendaraan dinas bermotor- perorangan
Rp 137.710.536,00

- Beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya Rp 600.000,00
- Beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih Rp 2.460.107,00
- Beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin Rp 17.080.000,00
- Beban pemeliharaan komputer-komputer unit- personal komputer Rp 24.566.000,00
- Beban pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal computer Rp 4.690.000,00
- Beban pemeliharaan bangunan Gedung-bangunan Gedung tempat kerja-bangunan Gedung kantor Rp 103.875,00

d. Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 sebesar
Rp.970.705.635,00

- Beban perjalanan dinas biasa Rp 744.870.635,00
- Beban perjalanan dinas dalam kota Rp 188.335.500,00
- Beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota Rp 37.500.000,00

e. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Beban hadiah yang bersifat perlombaan Rp 2.500.000,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah beban penyusutan dan amortisasi tahun 2023 Rp.286.353.633,31 Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat asset yang bersangkutan. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

- Beban penyusutan peralatan mesin Rp 220.102.814,28
- Beban penyusutan Gedung dan bangunan Rp 63.770.869,00
- Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi Rp 2.222.449,31
- Beban amortisasi asset tidak berwujud Rp 257.500,00

3.3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu

BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah sebagai entitas akuntansi tidak mempunyai Pendapatan - LO atau Pendapatan - LO sebesar Rp. 0,00.

3.3.1 ASET

Aset BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah selama Periode 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.505.689.145,88 yang terdiri dari :

No	Uraian	Nilai Aset
		31 Des 2023
I	Aset Lancar	11.413.925,00
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
2	Piutang Retribusi Daerah	0,00
3	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,00
4	Persediaan	11.413.925,00
II	Aset Tetap	3.492.343.970,88
1	Tanah	52.500.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.774.796.323,98
3	Gedung dan Bangunan	3.188.543.486
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	184.604.634,00
5	Aset Tetap Lainnya	142.846.000,00
6	Akumulasi Penyusutan	(3.850.946.473,10)

No	Uraian	Nilai Aset
		31 Des 2023
III	Aset Lainnya	1.931.250,00
1	Aset Tidak Berwujud	192.995.000,00
3	Akm amortisasi aset tidak berwujud	(191.063.750,00)
	TOTAL	3.505.689.145,88

a) Aset Lancar

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan rekening kas untuk menampung Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan/atau Dana Tambahan Uang Persediaan (TU) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

Aset Lancar terdiri dari :

NO.	ASET LANCAR	JUMLAH
1	2	3
1	Kas dan Setara Kas	0,00
2	Persediaan	11.413.925,00
	Jumlah	11.413.925,00

Untuk kas dan setara kas atau kas di bendahara pengeluaran tidak ada sisa pada tahun 2023, sedangkan untuk persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 11.413.925,00 yang terdiri dari alat tulis kantor Rp 11.413.925,00

b) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Aset tetap yang berada di bawah penguasaan dan tanggung jawab Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari:

Tanah

Tanah memiliki luas **5.822 M²** dengan nama Pemegang hak Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Berkedudukan dikoba sertipikat hak pakai nomor 14 dan surat ukur nomor : 15 / padang mulia / 2010 tanggal 19 /02/ 2010 ditanda tangan oleh kepala kantor pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Bapak Ahmad Aminullah,SH NIP.19691006 199103 1004 Tanggal 02-03-2010, dengan nilai per 30 Juni 2022 sebesar Rp.52.500.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	Rp 52.500.000,00
Penambahan sampai 31 Des 2023	Rp. -
Pengurangan sampai 31 Des 2023	<u>Rp. -</u>
Saldo	Rp52.500.000,00

Saldo Tanah per 31 Des 2023 **Rp52.500.000,00**

Rincian jenis dan nilai tanah dibukukan di dalam KIB- A

Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin berupa alat –alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel Dan Alat ukur, alat-alat kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat laboratorium, dengan nilai total per 31 Des 2022 sebesar Rp 3.432.122.240,34 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	Rp. 3.432.122.240,34
Penambahan Sampai 31 Des 2022	Rp 357.428.865,64

Pengurangan Sampai 31 Des 2022 Rp. _____ - 4.709.182,00 -

Rp. 3.784.841.923,98

Gedung dan Bangunan

Saldo nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.214.133.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022 Rp. 1.214.133.000,00

Penambahan Sampai 31 Des 2022 Rp 2.234.400.486,00

Pengurangan Sampai 31 Des 2022 Rp. - 259.990.000,00

Rp. 3.188.543.486,00

Saldo Gedung dan bangunan per 31 Des 2023

Rp.3.188.543.486,00

Rincian jenis dan nilai gedung dan bangunan dibukukan di dalam KIB- C.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo nilai Jalan dan jembatan, instalasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 174.260.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022 Rp. 174.260.000,00

Penambahan Sampai 31 Des 2022 Rp 10.344.634,00

Pengurangan Sampai 31 Des 2022 Rp. - -

Rp.184.604.634,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023

Rp 184.604.634,00 Rincian jenis dan nilai jalan, irigasi dan jaringan dibukukan di dalam KIB-D

Aset Tetap lainnya

Saldo nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp142.846.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Saldo awal per 31 Desember 2022	Rp. 142.846.000,00
Penambahan Sampai 31 Des 2022	Rp -
Pengurangan Sampai 31 Des 2022	<u>Rp. - -</u>
Saldo	Rp 142.846.000,00

Saldo Aset Tetap lainnya per 31 Des 2022 **Rp142.846.000,00**

Rincian jenis dan nilai aset tetap lainnya dibukukan di dalam KIB-E.

Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan aset BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah sampai dengan bulan Desember 2023 tidak ada penyusutan, dan akan dilakukan penyusutan setelah selesai tahun berjalan

3.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang muncul akibat transaksi/kejadian di masa lalu yang akan mengakibatkan pengeluaran sumber daya (dana) di masa yang akan datang. Kewajiban OPD hanya merupakan kewajiban jangka pendek yang dapat berupa utang belanja maupun sisa UP (uang muka kerja) yang belum disetor ke Kas Daerah sampai akhir tahun anggaran atau sampai tanggal tertentu. Sampai dengan bulan Desember 2023 kewajiban sebesar Rp.0,00 hal ini dikarenakan tidak ada pendapatan di Bappelitbangda.

3.3.3 Ekuitas

Ekuitas BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.505.689.145,88 dan Total ekuitas dan kewajiban sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp.3.505.689.145,88

3.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (L P E)

Penjelasan per pos pada Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut

Ekuitas Awal

Ekuitas Awal yang ditampilkan oleh Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah sebagai entitas akuntansi merupakan nilai ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.717.703.860,29

Surplus/Defisit –LO

Merupakan nilai Surplus/Defisit –LO Per 31 Desember 2023 sebesar (Rp 7.128.023.006,31)

Jumlah Ekuitas Akhir sebelum Dampak Kumulatif (1) + (2)

Merupakan penjumlahan dari Ekuitas Awal sebesar Rp 1.717.703.860,29

dan penjumlahan dari surplus/defisit – LO per 31 Desember 2022 sebesar (Rp 7.128.023.006,31) dengan nilai sebesar (Rp 5.410.319.146,02).

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Merupakan nilai dari pos lain-lain yaitu :

- Penyesuaian Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp 8.506.309.931,00
- Mutasi serah terima antar SKPD adalah serah terima persediaan dari Sekretariat Daerah sebesar Rp 409.698.360,90

Sehingga jumlah dari dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp 8.916.008.291,90

Ekuitas Akhir

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 yang ditampilkan oleh Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah sebagai entitas akuntansi merupakan penjumlahan dari nilai Ekuitas Akhir sebelum dampak kumulatif sebesar (Rp 5.410.319.146,02) dengan jumlah Dampak Kumulatif sebesar Rp 8.916.008.291,90 sehingga nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp 3.505.689.145,88.

BAB IV

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH

Pada Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah berubah nomenklaturnya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah berdomisili di Jalan By Pass Koba Bangka Tengah merupakan unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

4.1 Kedudukan/Dasar Hukum/Dasar Kebijakan

Dalam pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan, BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

Pelaporan Keuangan BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 233);
- m. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269); Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 nomor 284) Nomor register Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (4.4/2020) tanggal 14 September 2020;
- n. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah 2023 Nomor 217);
- o. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1);
- p. Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1131);

- q. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2032 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1316)

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah, dan kemudian telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaannya.

Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tengah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan mempunyai tugas : membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaannya

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappelitbangda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Bangka Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Selanjutnya agar penjabaran tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah terlaksana dengan baik, dirumuskan beberapa target yang tertuang dalam tujuan dan sasaran jangka menengah.

- (1) Tujuan “Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah” dengan indikator sasaran persentase keselarasan antara RENSTRA/RENJA-PD dengan RPJMD/RKPD, sasaran strategisnya sebagai berikut :
 1. Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah
 2. Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
 3. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan public

(2) Tujuan “Peningkatan kualitas hasil litbang dan inovasi daerah” dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas.

4.3 Struktur Organisasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya diperlukan sumber daya manusia, asset atau modal, dan unit usaha yang masih operasional. Berikut sumber daya manusia, asset atau modal, dan unit usaha yang masih operasional yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian
 - b. Sub Koordinator Keuangan
 - c. Sub Koordinator Perencanaan
3. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Sub Koordinator Pengendalian
 - b. Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
4. Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia
 - a. Sub Koordinator Pemerintah
 - b. Sub Koordinator Pembangunan Manusia
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - a. Sub Koordinator Ekonomi
 - b. Sub Koordinator Sumber Daya Alam
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - a. Sub Koordinator Infrastruktur
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - a. Sub Koordinator Kelitbangan Ekonomi, Pemerintah dan Pembangunan Manusia

- b. Sub Koordinator Kelitbangan, Sumber Daya Alam,
Infrastruktur, Kewilayahan dan Lingkungan Hidup
8. Kelompok Jabatan Fungsional

4.4 Data Pegawai

Data Pegawai BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah diuraikan pada tabel berikut ini :

Nama	Pendidikan	Golongan	Jabatan
Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M.Si 19790203 200604 1 003	S-3 Ilmu Administrasi	Pembina TK. I / IV b	Kepala
ZAITUN, S.Si., Apt., M.P.H 19790105 200501 2 013	S-2	Pembina TK. I / IV b	Sekretaris
WAHYU SETYOWATI, ST 19801227 200604 2 006	S-1 Teknik Geodesi	Pembina / IV a	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
EROIKA SARI WIDIYATNI, S.E 19810211 200604 2 007	S-1 Ekonomi Pembangunan	Pembina / IV a	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
DESIANA, S.H., MH 19801211 200604 2 007	S-2 Magister Hukum	Pembina / IV a	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintah dan Pembangunan Manusia
ARZALI, SE 19820104 200604 1 007	S-1 Manajemen	Pembina / IV a	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
MAULAN, S.E. 19770806 200903 1 001	S-1 Manajemen	Pembina / IV a	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
ENDANG OPRIANA, M.Si 19840314 201101 2 003	S-2 Entomologi / Fitopatologi	Pembina / IV a	Subkoordinator Sumber Daya Alam-Perencana Muda
SEPTI ANGRAENI, S.St.Pi, M.Si 19860921 201001 2 014	S-2 Perencanaan Pembangunan	Penata Tk. I / III d	Subkoordinator Sumber Ekonomi-Perencana Muda
HERLINA, S.IKom 19710130 200604 2 003	S-1 Ilmu Komunikasi	Penata Tk. I / III d	Subkoordinator Kelitbang Ekonomi, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia-Peneliti Muda
DIAN KUSUMAWATI, S.E., M.Acc 19870402 201001 2 010	S-1 Akuntansi	Penata Tk. I / III d	Subkoordinator Pengendalian-Perencana Muda
YETI, S.E. 19790318 201101 2 001	S-1 Manajemen	Penata Tk. I / III d	Subkoordinator Ekonomi-Perencana Muda
CAHYO BAWONO ADI, S.E. 19811219 201101 1 001	S-1 Akuntansi	Penata Tk. I / III d	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
NELLY APRILIA, S.AP 19840402 200604 2 014	S-1 Administrasi Publik	Penata / III c	Subkoordinator Perencanaan-Perencana Muda
EKA PRATIWI, M.Ec.Dev 19860904 200903 2 002	S-2 Ekonomi Pembangunan	Penata / III c	Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan-Perencana Muda

Nama	Pendidikan	Golongan	Jabatan
HARTONO, S.P., M.Sc. 19840508 201101 1 004	S-2 Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan	Penata / III c	Subkoordinator Kelitbang SDA, Infrastruktur, Kewilayahan dan Lingkungan Hidup-Peneliti Muda
HENDRAWAN, S.E 19771016 201001 1 007	S-1 Manajemen Keuangan	Penata / III c	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
SULISTARINI, S.Si 19850220 201402 2 002	S-1 Geografi dan Ilmu Lingkungan	Penata / III c	Subkoordinator Infrastruktur-Perencana Muda
NOVITA AFRIYANTI, SKM 19761115 200501 2 005	S-1 Kesehatan Masyarakat	Penata / III c	Analisis Sosial Budaya
RATIH KUSUMASTUTI, S.E., M.Si 19861004 202203 2 002	S-2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	Penata Muda Tk. I / III b	Peneliti Pertama
MILIA RIZKI NUR ASIH, M.Ec.Dev 19921006 202203 2 007	S-2 Ekonomi Pembangunan	Penata Muda TK. I / III b	Peneliti Pertama
ATIKAH, S.Kom 19850505 201001 2 027	S-1 Sistem Informasi	Penata Muda / III a	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
ANGGUN GUNANTO, S.P.W.K 19850624 201101 1 006	S-1 Perencanaan Wilayah Kota	Penata Muda / III a	Analisis Pemerintahan Daerah
TRI ENDAH, S.T 19890516 201902 2 006	S-1 Teknik Sipil	Penata Muda / III a	Analisis Infrastruktur
RINI DWI NOPIANTI, S.E 19901126 201902 2 004	S-1 Akuntansi	Penata Muda / III a	Analisis Perencanaan
DHEA RIZKY MAHARANI, S.Tr.Sos 19950621 201902 2 005	D-IV Pekerjaan Sosial	Penata Muda / III a	Analisis Penelitian dan Pengembangan
FITRIANA APRILIYANTI, A.Md 19920406 201402 2 002	D-III Teknik Komputer	Penata Muda / III a	Bendahara
MARIA MAHDALENA BR SILALAH, S.Sos 19890623 202203 2 004	S-1 Antropologi	Penata Muda / III a	Analisis Sosial Budaya
YENI MEYLANI, G, S.E. 19900517 202203 2 005	S-1 Akuntansi	Penata Muda / III a	Analisis Ekonomi Kreatif
BAYU PRASETIYO, S.T. 19910523 202203 1 010	S-1 Teknik Lingkungan	Penata Muda / III a	Analisis Lingkungan Hidup
EKA DEWINTA, S.E. 19920825 202203 2 009	S-1 Manajemen	Penata Muda / III a	Analisis Perekonomian
ELITA FINNI SIHOMBING, S.E. 19931129 202203 2 010	S-1 Ekonomi	Penata Muda / III a	Analisis Program Pembangunan
DENNY SETIAWAN, S.T. 19950512 202203 1 012	S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota	Penata Muda / III a	Analisis Penataan Kawasan
ADE ARINDA, S.T. 19960910 202203 2 015	S-1 Teknik Lingkungan	Penata Muda / III a	Analisis Lingkungan Hidup
RIZKY AMILIANA, S.E. 19961016 202203 2 020	S-1 Manajemen	Penata Muda / III a	Analisis Perekonomian
ENDANG SRI WULANSARI, S.E. 19980220 202203 2 018	S-1 Ekonomi Pembangunan	Penata Muda / III a	Analisis Program Pembangunan
AGUNG TAUFIQ ARRAHMAN, S.T. 19981214 202203 1 004	S-1 Teknik Sipil	Penata Muda / III a	Analisis Infrastruktur

Nama	Pendidikan	Golongan	Jabatan
MUHAMMAD ABIDZAR, S.T. 19990509 202203 1 002	S-1 Teknik Sipil	Penata Muda / III a	Analisis Infrastruktur
ROSA MAHDALENA, A.Md 19771103 201101 2 002	D-III Sekretaris	Pengatur Tingkat I / II d	Arsiparis Terampil
YANUARDY SAFUTERA, S.E 19830111 200604 1 013	S-1 Manajemen	Pengatur Tingkat I / II d	Penyusun Bahan Rencana dan Evaluasi
ARI ANDI PRAYOGA, A.Md. 19960404 202203 1 006	D-III Komputer Akuntansi	Pengatur / II c	Verifikator Keuangan
SONIA LOLITA, A.Md. 19970525 202203 2 011	D-III Akuntansi	Pengatur / II c	Pranata Laporan Keuangan

4.5 Kebijakan

Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaan bidang Perencanaan, terutama memiliki nilai-nilai strategis yang menjadi modal dasar yang dapat dikembangkan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah. Adapun kebijakan yang ingin dicapai BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah adalah mengembangkan sektor Perencanaan daerah meliputi :

1. Optimalisasi e-planning dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
2. Penyusunan rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah
3. Re-focusing Program/Kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan
4. Mewujudkan pengelolaan data yang akurat dan terkini untuk mendukung proses perencanaan pembangunan
5. Melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan secara optimal dalam rangka memastikan kesesuaian antara realisasi

dana dan capaian keluaran (output) kegiatan guna mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan serta memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan

6. Pelaksanaan evaluasi kesesuaian antar dokumen perencanaan
7. Melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan , perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
8. Mengadaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian
9. Mengembangkan dan meningkatkan inovasi daerah yang kondusif untuk kesejahteraan masyarakat

4.6 Program

Program adalah Penjabaran Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan Organisasi Perangkat Daerah, sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota
6. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

BAB V

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan OPD Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas, mampu dimengerti dan menjadi alat untuk evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk perbaikan di masa yang akan datang, Selama periode/tahun anggaran 2023 BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah menerima anggaran **Rp 9.268.471,00** terealisasi **Rp 8.506.309.931,00** atau 91,78% dengan sisa anggaran **Rp 762.161.069,00** atau 8,22%.

Selanjutnya Laporan Keuangan OPD Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 ini akan menjadi dokumen yang akan di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia guna memberi opini atas pelaksanaan administrasi keuangan di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini berisikan tentang laporan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Laporan tersebut dapat berupa perbandingan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah direncanakan (ditetapkan), dengan demikian akan dapat diketahui kondisi keuangan, efektifitas dan efisiensi OPD.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua sebagai bentuk dokumen pertanggungjawaban dalam menilai kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di OPD Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah.